



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN
LITERASI MASYARAKAT

KOTA BLITAR
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Akhir Penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar 2023**. Semoga laporan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan, acuan, petunjuk maupun pedoman pembuatan kebijakan.

Literasi adalah salah satu fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkembang. Kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan adalah aset yang tak ternilai dalam memajukan kualitas hidup, mempromosikan inklusi sosial, dan memberikan peluang yang lebih baik. Pembangunan literasi masyarakat erat hubungannya dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan kebutuhan literasi masyarakat.

Laporan akhir ini sebagai serangkaian kegiatan penelitian nilai indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Blitar. Kegiatan penelitian ini dilakukan berbasis penelitian lapang dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada *person in charge* (PIC) Perpustakaan di Kota Blitar. Laporan ini merupakan sebuah kajian dan masukan bagi perbaikan dan perumusan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kepada seluruh lokus masyarakat. Saran, masukan dan kritik kami harapkan untuk memperbaiki upaya lanjutan ke arah reformasi birokrasi yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Referensi Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan	4
1.4. Sasaran	4
1.5. Manfaat	4
1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan	5
1.7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
BAB II METODE KERJA	7
2.1. Rumusan Masalah	7
2.2. Metode Penelitian	7
2.3. Metode Pengumpulan Data	8
2.3.1. Jenis Data	8
2.3.2. Sumber Data	9
2.3.3. Metode Pengumpulan Data	9
2.3.4. Validasi Instrumen	9
2.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	11
2.4.1. Metode Pengolahan Data	11
2.4.2. Analisis Data	13
2.5. <i>Output</i> Penelitian	24
2.6. Tujuan dan Fungsi Instansi Terkait Pengukuran IPLM	25
2.7. Kondisi Ideal Perpustakaan	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
3.1. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan Kota Blitar	33
3.2. Gambaran Aspek Masyarakat	37
3.3. Gambaran Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	38
3.3.1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	38

3.3.2.	Ketercukupan Koleksi (UPLM2).....	40
3.3.3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	41
3.3.4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4).....	43
3.3.5.	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5).....	45
3.3.6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6).....	47
3.3.7.	Anggota Perpustakaan (UPLM7).....	49
3.4.	Laporan Skor IPLM Kota Blitar tahun 2023	50
3.5.	Perbandingan hasil skor IPLM tahun 2022 dan tahun 2023	52
3.6.	Kendala Pengelolaan Perpustakaan.....	55
3.7.	Rekomendasi Program/Kegiatan	58
BAB IV PENUTUP		61
LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aspek Masyarakat berdasarkan Jenis Perpustakaan.....	22
Tabel 2. 2 Angka pembagi rasio Kabupaten/Kota.....	23
Tabel 2. 3 Angka Koreksi Berdasarkan Kepadatan Penduduk.....	23
Tabel 3. 1 Output Penelitian berdasarkan maksud dan tujuan.....	24
Tabel 3. 2 Gambaran Aspek Masyarakat.....	37
Tabel 3. 3 Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	38
Tabel 3. 4 Skor UPLM1	39
Tabel 3. 5 Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	40
Tabel 3. 6 skor UPLM2	41
Tabel 3. 7 Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	42
Tabel 3. 8 skor UPLM3	43
Tabel 3. 9 Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	43
Tabel 3. 10 Skor UPLM4.....	45
Tabel 3. 11 Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5).....	46
Tabel 3. 12 Skor UPLM5.....	47
Tabel 3. 13 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	47
Tabel 3. 14 Skor UPLM6.....	48
Tabel 3. 15 Anggota Perpustakaan (UPLM7)	49
Tabel 3. 16 Skor UPLM7.....	50
Tabel 3. 17 Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023	51
Tabel 3. 18 Perbandingan hasil skor IPLM tahun 2022 dan tahun 2023.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pembobotan per jenis perpustakaan	15
Gambar 2. 2 Tingkatan Skor IPLM	24
Gambar 3. 1 Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	36
Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Skor IPLM.....	51
Gambar 3. 3 Gambaran Kendala Pengelolaan Perpustakaan	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Pengumpulan Data.....	63
Lampiran 2 Dokumentasi Pemaparan Laporan Pendahuluan.....	70
Lampiran 3 Dokumentasi Pengumpulan Data	71
Lampiran 4 Dokumentasi Pemaparan Laporan Akhir IPLM	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar, artinya pembangunan perpustakaan saat ini telah menjadi urusan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk itu capaian dan peran perpustakaan daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu diinformasikan ke publik.

Capaian dan peran perpustakaan dalam turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terindikasi dalam nilai Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM). IPLM secara umum merupakan penilaian dari sisi hulu yaitu melihat infrastruktur perpustakaan lebih merata di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota Blitar, sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber informasi serta memanfaatkan dan

mendayagunakan berbagai layanan dan fasilitas di perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Selain itu perubahan peraturan turut mendasari perlunya pengukuran angka IPLM di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwasanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan. Tahun 2022 untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Blitar melakukan perhitungan nilai IPLM. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2022 tercapai 11,37 (kategori rendah), lebih tinggi dari target sebesar 6,5 (kategori rendah).

Untuk itu dipandang perlu pada tahun 2023 disusun kembali Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar guna memberikan gambaran pemetaan dan perkembangan infrastruktur perpustakaan berdasarkan aspek-aspek Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Blitar. data IPLM yang nantinya tersusun diharapkan dapat terpadu dan terintegrasikan, serta berkelanjutan sehingga perkembangan pembangunan perpustakaan dapat terpantau dengan baik. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.2. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perumahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar
9. Peraturan WaliKota Blitar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
11. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 90 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dilaksanakannya penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah mengetahui kondisi infrastruktur perpustakaan, baik pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, SDM Tenaga perpustakaan, pemerataan layanan, sebaran perpustakaan, potensi perpustakaan, dsb.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah memperoleh nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023, mengetahui perkembangan pembangunan perpustakaan di Kota Blitar dan rekomendasi pengembangan perpustakaan selanjutnya.

1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai acuan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Blitar tahun 2023.

1.5. Manfaat

Penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Diketuinya nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023

- 2) Diketuainya kelemahan dan kekuatan masing-masing Unsur Pembangun Literasi Masyarakat.
- 3) Sebagai dasar penetapan kebijakan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari hasil kajian IPLM tahun 2023.

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan yang meliputi persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Tahap pengumpulan data dan informasi yang meliputi:
 - a. Pengumpulan data-data sekunder
 - b. Pengumpulan data primer dari surveyor yang meliputi data dan perubahannya;
- 3) Inventarisasi dan analisa yang meliputi:
 - a. Gambaran terkini perkembangan data pendukung penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - b. Perumusan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023
 - c. Analisa strategi peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023;
- 4) Perumusan konsep rekomendasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023.

1.7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar tahun 2023 bertempat di wilayah administrasi Kota Blitar. Waktu

pelaksanaan kegiatan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan Ke (Sejak diterbitkannya SPMK)							
		Bulan ke 1				Bulan ke 2			
A.	PERSIAPAN / PENYUSUNAN LAPORAN PENDAHULUAN	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan								
2.	Studi Literatur / Survey Pendahuluan								
3.	Identifikasi Permasalahan								
4.	Metodologi penyusunan								
5.	Penyusunan Laporan Pendahuluan								
7.	FGD Laporan Pendahuluan								
B.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR								
1.	Perumusan hasil identifikasi								
2.	Penyusunan Konsep Rekomendasi								
3.	Penyusunan Laporan Akhir								
4.	FGD Laporan Akhir								
5.	Penyempurnaan Laporan Akhir								
C.	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN								

BAB II METODE KERJA

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah terkait dengan kegiatan Penyusunan Indeks Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerataan layanan perpustakaan, sebaran perpustakaan serta potensi perpustakaan di Kota Blitar?
2. Bagaimana kecukupan koleksi perpustakaan di Kota Blitar?
3. Bagaimana kondisi SDM/Tenaga Perpustakaan yang berkaitan dengan jumlah dan sertifikasi pustakawan di Kota Blitar?
4. Bagaimana kondisi pengunjung perpustakaan di Kota Blitar?
5. Bagaimana kondisi perpustakaan ber-SNP di Kota Blitar?
6. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE yang diadakan oleh perpustakaan di Kota Blitar?
7. Bagaimana kondisi anggota perpustakaan yang terdaftar di Kota Blitar?

2.2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan kegiatan yaitu untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), maka metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian Kajian Pembangunan Indeks Literasi Masyarakat

Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian deskriptif dan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Secara lebih spesifik, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case study). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup keseluruhan siklus dari individu, kelompok, atau lembaga dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu ataupun meliputi keseluruhan faktor-faktor kasus tertentu, ataupun keseluruhan faktor-faktor dan fenomena.

2.3. Metode Pengumpulan Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Adapun data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan data pada aspek masyarakat (AM) dan Unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM).

2.3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua macam tergantung dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung melalui proses wawancara kepada PIC Perpustakaan di Kota Blitar. Selanjutnya sumber data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan statistik tahunan BPS, EMIS Pendis Kemenag, dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

2.3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), teknik pengumpulan data dibagi berdasarkan jenis data. Metode pengumpulan data primer yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan setiap PIC Perpustakaan di Kota Blitar, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan khusus. Metode pengumpulan data skunder pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka/literatur.

2.3.4. Validasi Intrumen

Validasi instrumen penelitian pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilakukan oleh tenaga ahli konsultan bersama Perpustakaan Kota Blitar. Validasi instrumen dilakukan dengan kombinasi dari empat jenis validasi, yakni:

1. Validasi eksternal. Validasi eksternal mengacu pada review hasil rujukan penelitian sejenis dari pihak luar (ekternal) peneliti. Berdasarkan hal tersebut, validitas ini juga disebut validitas rupa atau face validity. Pihak Konsultan telah melakukan review instrumen sebelumnya dari pihak vendor pelaksana kegiatan ini.

2. Validasi Konstruk (construct validity). Konstruk (construct) adalah kerangka dari suatu konsep. Kajian ini ingin mengukur konsep mengenai sebuah ukuran indeks pembangunan literatur masyarakat. Seperti telah dibahas pada Bab 2, Konsultan telah meng-konstruksikan pembentuk ukuran indeks pembangunan literatur masyarakat sesuai literatur dan penelitian sebelumnya.
3. Validasi Isi (content validity). Validasi isi atas instrumen penelitian telah dilakukan dengan mengidentifikasi sejauh mana isi dari instrumen tersebut mewakili semua aspek yang dianggap pembentuk kerangka konsep. Pertanyaan kunci dalam validasi isi: apakah seluruh isi definisi terwakili dalam suatu ukuran? Ukuran harus mengandung bagian/sampel yang mewakili semua ide (hipotesis) pembentuk konsep; itu sudah tersedia dalam instrumen penelitian final.
4. Validasi Prediktif (predictive validity). Instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ukuran-ukuran prediktif mengenai data perpustakaan, pemustaka, dan data terkait telah tersedia sehingga dapat menjadi baseline prediksi di masa yang akan datang.

Selain pengujian validasi terhadap pertanyaan-pertanyaan pembentuk indeks, pelaksanaan uji coba juga melakukan evaluasi teknis sebelum survei di lapangan. Berikut item-item hasil evaluasi teknis sebelum pelaksanaan survei.

1. Apakah prosedur awal permohonan wawancara mudah direspon baik oleh target responden? Apabila proses perizinan cukup sulit dan memakan waktu cukup lama, disarankan melakukan proses pendekatan secara formal dan pendekatan terhadap PIC dari Perpustakaan Daerah yang menjadi target.
2. Apakah durasi wawancara tatap muka setiap responden apakah sesuai jadwal yang ideal yakni maksimum 30-45 menit batas konsentrasi wawancara responden? Apabila melewati batas waktu

ideal atau dirasakan lama oleh responden, maka disarankan untuk mengurangi pertanyaan atau menggunakan meringkas beberapa pertanyaan.

3. Apakah setiap pertanyaan itu dapat dipahami oleh responden dengan baik? Apabila responden mengalami kebingungan atas pertanyaan yang diajukan, maka disarankan untuk menyusun ulang kalimat pertanyaan atau diberikan penjelasan (dengan alat bantu Show Card) agar dapat mudah dipahami.

2.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

2.4.1. Metode Pengolahan Data

Analisis hasil wawancara di lapangan akan disusun oleh konsultan secara sistematis dari olah tabulasi hingga analisis, baik deskriptif maupun inferensial.

1. Memeriksa (editing) yaitu proses pemeriksaan kembali yang dilakukan secara berulang-ulang dan cermat terhadap hasil survey atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui angket agar dapat meningkatkan keandalan data.
2. Memberi tanda (*coding*) yaitu mengklarifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dengan memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing
3. Tabulasi data, Selain hasil data dalam bentuk indeks hasil, juga disajikan dalam bentuk tabulasi data setiap item pertanyaan vis a vis parameter utama seperti demografi responden. Tabulasi data hasil survei ditampilkan dalam format MS Excel, berupa bentuk cross tabulation maupun pivot table.
4. Analisis deskriptif, Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan informasi indeks literasi masyarakat per variabel atau total berdasarkan profil demografi responden.
5. Menghitung indeks pembangunan literasi masyarakat dengan indikator dan metode yang telah ditentukan.

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca (Sugiyono, 2007:169). Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kuantitatif sehingga diperlukan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa tepat alat ukur yang dapat melakukan fungsinya. Alat ukur yang digunakan dalam menguji validitas adalah angka hasil skor pertanyaan ataupun skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam angket. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti (Ridwan, 2011:194).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata *rely* dalam bahasa Inggris yang berarti percaya, dan *reliable* yang berarti keterpercayaan. Sehingga reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan. Menurut Sugiyono (2012) "instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama". Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang: disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
- b. *One Shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukur korelasi antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 2011).

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yakni perhitungan yang

dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuisioner. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang akurat dan teruji. Uji realibilitas dapat dilakukan dengan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right)$$

Keterangan:

α : nilai reliabilitas instrumen

k : jumlah item instrumen

$\sum \sigma_b^2$: varian item instrumen

$\sigma^2 t$: varian total

Kriteria pengujian adalah jika nilai $\alpha > 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika $\alpha > 0,8$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat (Sugiyono, 2012). Sumber lain, seperti yang diungkapkan Arikunto (2010:240) menyatakan jika $\alpha > 0,9$ maka reliabilitas sempurna. Jika $0,7 < \alpha < 0,9$ maka reliabilitas tinggi. Jika $0,5 < \alpha < 0,7$ maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha > 0,5$ maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

2.4.2. Analisis Data

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang membedakannya dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih

memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran membaca, dan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayahnya sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

1) Rumus Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) komponen, yakni komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Adapun rumus pengukuran IPLM adalah sebagai berikut:

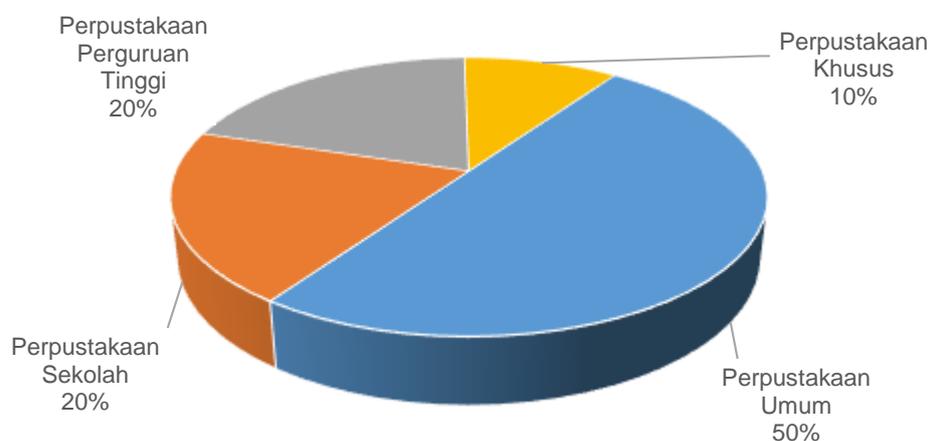
$$IPLM = \sum_I \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLM_i : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat

AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan

Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat beserta pembagiannya dari komponen Aspek Masyarakat. Rumus yang telah dikembangkan ini juga memiliki komponen pendukung baru di antaranya adalah Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan Wilayah. Kedua komponen baru ini berfungsi sebagai komponen pendukung dalam rangka netralisasi terhadap anomali angka yang muncul karena faktor ketimpangan angka yang disebabkan tinggi rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Selain itu pada setiap pengukuran UPLM terdapat pembobotan pada tiap jenis perpustakaan dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Pembobotan per jenis perpustakaan

Adapun pembobotan per jenis perpustakaan ini diterapkan berdasarkan besarnya cakupan pemustaka yang dilayani oleh tiap perpustakaan tersebut. Perpustakaan umum memiliki porsi bobot terbesar (50%) karena memiliki cakupan layanan pemustaka yang lebih luas dan

beragam. Berbeda dengan jenis perpustakaan lainnya, yakni perpustakaan sekolah/madrasah (20%), perpustakaan perguruan tinggi (20%), dan perpustakaan khusus (10% yang memiliki segmentasi pemustaka yang lebih spesifik dan terbatas pada lingkup instansi yang membawahnya. Dengan demikian pada setiap penghitungan UPLM1 hingga UPLM7 pada tiap jenis perpustakaan berlaku pembobotan tersebut.

2) Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM₁)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₁:

$$UPLM_1 = \left\{ 50\% \left[\frac{\sum \text{perpustakaan umum}}{\sum \text{penduduk}} \right] + 20\% \left[\frac{\sum \text{perpustakaan sekolah}}{\sum \text{civitas sekolah}} \right] + 20\% \left[\frac{\sum \text{perpustakaan PerguruanTinggi}}{\sum \text{civitas kademika}} \right] + 10\% \left[\frac{\sum \text{perpustakaan khusus}}{\sum \text{penduduk}} \right] \right\} \times \begin{bmatrix} \text{angka} \\ \text{koreksi} \end{bmatrix}$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen UPLM₁ terdiri atas:

- a) Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan umum (kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi penduduk kabupaten/kota;
- b) Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi dengan jumlah populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di kabupaten/kota. Catatan: perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina;

- c) Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas akademika (jumlah mahasiswa dan dosen) di kabupaten/kota;
- d) Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) yang dibagi dengan jumlah populasi bekerja di wilayah kabupaten/kota.

2. Ketercukupan Koleksi (UPLM₂)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₂:

$$UPLM_2 = \left\{ 50\% \left[\frac{\text{koleksi } \Sigma \text{ perpustakaan umum}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{koleksi } \Sigma \text{ perpustakaan sekolah}}{\Sigma \text{ civitas sekolah}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{koleksi } \Sigma \text{ perpustakaan PerguruanTinggi}}{\Sigma \text{ civitasa akademika}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{koleksi } \Sigma \text{ perpustakaan khusus}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] \right\} \times \left[\begin{matrix} \text{angka} \\ \text{koreksi} \end{matrix} \right]$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini (satuan judul) terdiri atas:

- a) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk kabupaten/kota;
- b) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota. Catatan: koleksi yang dihitung/diukur adalah koleksi buku teks pengayaan (di luar kurikulum sekolah), bukan buku paket pelajaran;
- c) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan perguruan tinggi (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;
- d) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan khusus (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota.

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM₃)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₃:

$$UPLM_3 = \left\{ 50\% \left[\frac{\begin{matrix} tenaga \\ \Sigma perpustakaan \\ umum \\ \Sigma penduduk \end{matrix}}{\begin{matrix} tenaga \\ \Sigma perpustakaan \\ sekolah \\ \Sigma civitas \\ sekolah \end{matrix}} + 20\% \left[\frac{\begin{matrix} tenaga \\ \Sigma perpustakaan \\ PerguruanTinggi \\ \Sigma civitasa \\ kademika \end{matrix}}{\begin{matrix} tenaga \\ \Sigma perpustakaan \\ khusus \\ \Sigma penduduk \end{matrix}} \right] \times \left[\begin{matrix} angka \\ koreksi \end{matrix} \right] \right.$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi penduduk kabupaten/kota;
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota;
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah tenaga perpustakaan perguruan tinggi (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;
- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan khusus, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi bekerja di kabupaten/kota.

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM₄)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₄:

$$UPLM_4 = \left\{ 50\% \left[\frac{\begin{matrix} kunjungan \\ \Sigma perpustakaan \\ umum \\ \Sigma penduduk \end{matrix}}{\begin{matrix} kunjungan \\ \Sigma perpustakaan \\ sekolah \\ \Sigma civitas \\ sekolah \end{matrix}} + 20\% \left[\frac{\begin{matrix} kunjungan \\ \Sigma perpustakaan \\ PerguruanTinggi \\ \Sigma civitasa \\ kademika \end{matrix}}{\begin{matrix} kunjungan \\ \Sigma perpustakaan \\ khusus \\ \Sigma penduduk \end{matrix}} \right] \times \left[\begin{matrix} angka \\ koreksi \end{matrix} \right] \right.$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- Rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari di perpustakaan umum (secara *onsite* maupun *online*), yakni jumlah kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
- Rasio tingkat kunjungan civitas sekolah per hari di perpustakaan sekolah/madrasah (secara *onsite* maupun *online*), yakni jumlah kunjungan civitas sekolah per hari dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota;

- c) Rasio tingkat kunjungan civitas akademika per hari di perpustakaan perguruan tinggi (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas akademika per hari dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;
 - d) Rasio tingkat kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus (secara onsite dan online), yakni jumlah kunjungan karyawan/pegawai per hari dibagi dengan jumlah populasi bekerja di kabupaten/kota.
5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM₅)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₅:

$$UPLM_5 = \left[50\% \left[\frac{\text{perpustakaan}}{\Sigma \text{ umum}} \frac{\text{berSNP}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{perpustakaan}}{\Sigma \text{ sekolah}} \frac{\text{berSNP}}{\Sigma \text{ civitas sekolah}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{perpustakaan}}{\Sigma \text{ PerguruanTinggi}} \frac{\text{berSNP}}{\Sigma \text{ civitasa kademika}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{perpustakaan}}{\Sigma \text{ khusus}} \frac{\text{berSNP}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] \right] \times \left[\begin{matrix} \text{angka} \\ \text{koreksi} \end{matrix} \right]$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen UPLM₅ terdiri atas:

- a) Rasio jumlah perpustakaan umum yang dibina beasiswa Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yakni jumlah perpustakaan umum yang sudah dibina sesuai dengan SNP, sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan, baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan umum yang ada di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
- b) Rasio jumlah perpustakaan sekolah/madrasah berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan sekolah/madrasah yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- c) Rasio jumlah perpustakaan perguruan tinggi berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan tinggi yang ada di wilayah kabupaten/kota;

d) Rasio jumlah perpustakaan khusus berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan khusus umum yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan khusus yang ada di wilayah kabupaten/kota.

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM₆)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₆:

$$UPLM_6 = \left\{ 50\% \left[\frac{\text{masy.terlibat}}{\sum \text{perpustakaan umum}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{masy.terlibat}}{\sum \text{perpustakaan sekolah}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{masy.terlibat}}{\sum \text{PerguruanTinggi}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{masy.terlibat}}{\sum \text{perpustakaan khusus}} \right] \right\} \times \left[\begin{matrix} \text{angka} \\ \text{koreksi} \end{matrix} \right]$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- Rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
- Rasio jumlah partisipasi civitas sekolah dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah civitas sekolah yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
- Rasio jumlah partisipasi civitas akademika dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
- Rasio jumlah partisipasi karyawan/pegawai dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi karyawan/pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota.

7. Jumlah anggota perpustakaan (UPLM₇)

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM₇:

$$UPLM_7 = \left[50\% \left[\frac{\text{pemustaka}}{\Sigma \text{ perpustakaan}} \right] \frac{\text{umum}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{pemustaka}}{\Sigma \text{ perpustakaan}} \right] \frac{\text{sekolah}}{\Sigma \text{ civitas}} \left[\frac{\text{pemustaka}}{\Sigma \text{ perpustakaan}} \right] \frac{\text{PerguruanTinggi}}{\Sigma \text{ kademika}} \left[\frac{\text{pemustaka}}{\Sigma \text{ perpustakaan}} \right] \frac{\text{husus}}{\Sigma \text{ penduduk}} \right] \times \left[\begin{matrix} \text{angka} \\ \text{koreksi} \end{matrix} \right]$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- Rasio jumlah anggota perpustakaan umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), yakni jumlah anggota perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk kabupaten/kota;
- Rasio jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah dibagi dengan jumlah civitas sekolah yang ada di kabupaten/kota;
- Rasio jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika yang ada di kabupaten/kota;
- Rasio jumlah anggota perpustakaan khusus, yakni jumlah anggota perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk bekerja yang ada di kabupaten/kota.

3) Aspek Masyarakat (AM)

Konsep pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, komponen Aspek Masyarakat (AM), disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan. Berikut adalah sumber data resmi berdasarkan segmentasi jenis perpustakaan komponen Aspek Masyarakat (AM) dalam penerapan rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM):

Tabel 2. 1 Aspek Masyarakat berdasarkan Jenis Perpustakaan

Perpustakaan Umum	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Perpustakaan Khusus
Jumlah populasi penduduk Kabupaten/Kota	Jumlah civitas sekolah: 1. Peserta didik/siswa 2. guru	Jumlah civitas akademika: 1. mahasiswa 2. tenaga edukasi/dosen	Jumlah populasi bekerja
Sumber: Laporan statistik tahunan BPS Kota Blitar (Kota Blitar Dalam Angka 2023)	Sumber: 1. laman data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud 2. laman EMIS Pendidikan Islam Kemenag	Sumber: Laporan statistik tahunan BPS Kota Blitar (Kota Blitar Dalam Angka 2023)	Sumber: Laporan statistik tahunan BPS Kota Blitar (Kota Blitar Dalam Angka 2023)

Rincian data beserta sumbernya pada tabel di atas tersebut selanjutnya digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023.

4) Angka Pembagi Rasio Kabupaten/Kota

Komponen Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota ditujukan untuk membuat skala bagi angka pembagi populasi pada saat pengukuran rasio UPLM bagi provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Hal ini dilakukan karena adanya anomali angka yang disebabkan faktor tinggi dan rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Meski demikian hal ini menjadikan ketimpangan angka di mana angka rasio di wilayah yang memiliki populasi rendah lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki populasi lebih tinggi/padat. Dengan demikian angka rasio provinsi dan kabupaten/kota yang dihasilkan dari hasil pembagi tersebut tidak menjadi terlalu kecil agar memudahkan dalam penerapan rumus IPLM. Tabel rincian Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka pembagi rasio Kabupaten/Kota

NO.	JUMLAH PENDUDUK (JIWA/KM)	JUMLAH ANGGOTA
1	<200.000	4.000
2	200.000-300.000	6.000
3	300.000-400.000	8.000
⋮	⋮	⋮
29	2.900.000-3.000.000	60.000
30	3.000.000-3.100.000	62.000

Sumber: Pedoman Pengukuran IPLM 2021

Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota diadopsi dari jumlah minimal pemustaka berdasarkan jumlah populasi penduduk pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5) Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan

Fungsi dari Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan memiliki kesamaan dengan Angka Pembagi Rasio Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hanya saja Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan ini diterapkan pada angka yang dihasilkan setelah rasio UPLM dihitung kemudian dikalikan dengan angka koreksi yang ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan wilayahnya. Tabel rincian Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan adalah sebagai berikut:

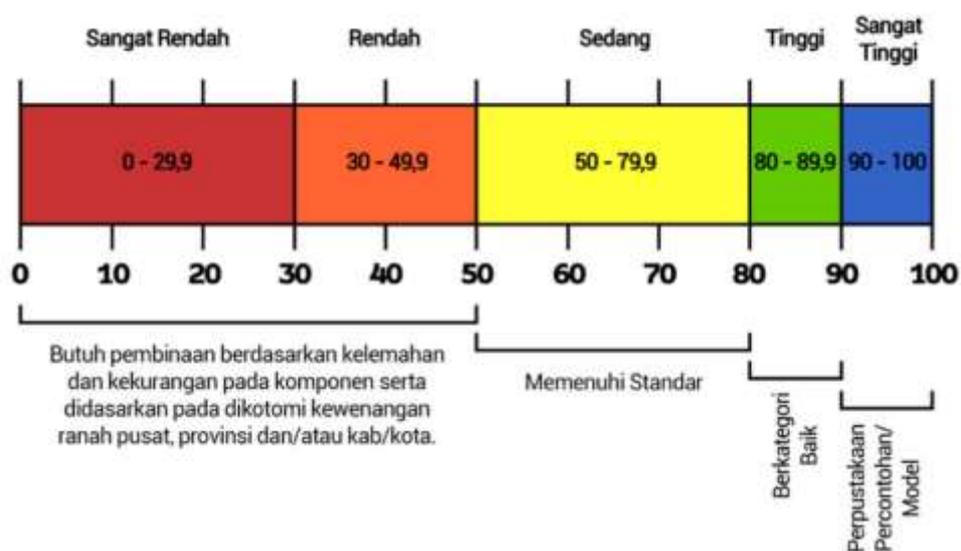
Tabel 2. 3 Angka Koreksi Berdasarkan Kepadatan Penduduk

NO.	JUMLAH PENDUDUK (JIWA/KM)	ANGKA KOREKSI
1	<1.000	1,0
2	1.001 - 5.000	1,5
3	5.001 - 10.000	2,0
4	>10.000	2,5

Dengan demikian wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan memiliki angka rasio yang lebih logis dan tidak terlampaui kecil akibat angka pembagi populasi yang besar.

6) Tingkatan Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berbeda dengan konsep pengukuran dalam kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebelumnya, pada pengukuran ini skor indeks menggunakan skala level 100



Gambar 2. 2 Tingkatan Skor IPLM

2.5. **Output Penelitian**

Sasaran dari pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk memperoleh data semua perpustakaan di Kota Blitar dan terukurnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar tahun 2023. Dari sasaran tersebut, kajian ini nantinya akan memiliki keluaran (*output*) sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Output Penelitian berdasarkan maksud dan tujuan

No	Maksud & tujuan	Output penelitian
1	Mengetahui Permerataan layanan Perpustakaan sebaran perpustakaan, serta potensi perpustakaan.	●Rasio perpustakaan di Kota Blitar
2	Mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan mulai dari jumlah koleksi (judul dan eksemplar buku), Judul koleksi digital/eresources, sirkulasi perbulan dalam 1 tahun.	●Jumlah koleksi ●Rasio koleksi perpustakaan

No	Maksud & tujuan	Output penelitian
3	Mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan, diantaranya Jumlah SDM, Kualifikasi SDM, Jumlah Pustakawan, Jumlah pustakawan yang bersertifikasi, Jumlah tenaga yang bersertifikasi Diklat, Jumlah SDM yang bersertifikasi pustakawa.	<ul style="list-style-type: none"> ●Demografi SDM Perpustakaan Kota Blitar ●Rasio SDM/Penduduk ●Rasio penduduk/ tenaga perpustakaan berbasis lembaga
4	Mengetahui Pengunjung semua jenis perpustakaan, diantaranya; jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), jam layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan perbulan/tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis Lembaga.	<ul style="list-style-type: none"> ●Demografi pengunjung ●Rasio pengunjung/ penduduk ●Rasio penduduk/ pemanfaatan perpustakaan berbasis lembaga ●Rasio penduduk/ tenaga perpustakaan
5	Mengetahui kondisi Perpustakaan Ber-SNP	<ul style="list-style-type: none"> ●Rasio perpustakaan berSNP/jumlah perpustakaan
6	Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dibidang perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ●Rasio keterlibatan masyarakat
7	Mengertahui jumlah Anggota Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ●Rasio anggota/penduduk

2.6. Tujuan dan Fungsi Instansi Terkait Pengukuran IPLM

Perpustakaan memegang peran penting dalam peningkatan literasi masyarakat, dan fungsinya sangat vital dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan berbudaya. Perpustakaan adalah harta karun pengetahuan yang tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Fungsi utama perpustakaan adalah menyediakan akses ke berbagai jenis bahan bacaan, mulai dari buku, majalah, jurnal, hingga sumber daya digital seperti e-book dan database. Dengan begitu banyak sumber informasi yang tersedia, perpustakaan menjadi tempat yang sangat penting bagi individu yang ingin meningkatkan literasi mereka.

Salah satu peran kunci perpustakaan adalah sebagai penyedia akses ke literatur dan pengetahuan. Ini mencakup berbagai genre, topik, dan tingkat kesulitan, memungkinkan individu untuk memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Baik itu literatur fiksi yang menghibur atau materi ilmiah yang mendalam, perpustakaan memiliki koleksi yang mencakup berbagai bidang.

Selain itu, perpustakaan juga menjadi lingkungan yang mendukung pembelajaran dan penelitian. Dengan menyediakan akses ke referensi dan sumber daya penelitian, perpustakaan membantu individu dalam mengejar keinginan mereka untuk mendalami berbagai bidang ilmu. Ini sangat penting dalam mengembangkan literasi akademik dan pengetahuan yang mendalam. Perpustakaan juga berperan sebagai pusat literasi komunitas. Mereka sering menyelenggarakan program-program literasi, seperti klub buku, pertunjukan cerita, lokakarya menulis, dan diskusi penulis. Program-program ini tidak hanya meningkatkan minat membaca tetapi juga membantu membangun komunitas pembaca yang aktif dan terlibat.

Sebagai tempat belajar, perpustakaan juga memainkan peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan literasi awal mereka. Program bacaan anak-anak, ceramah pengarang, dan kegiatan pendidikan lainnya memberikan peluang untuk anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas literasi yang mendidik dan menghibur. Selain itu, perpustakaan sering kali menjadi tempat tenang yang nyaman bagi individu untuk membaca dan belajar. Mereka menawarkan lingkungan yang kondusif untuk studi pribadi dan refleksi, yang membantu dalam peningkatan keterampilan membaca dan pemahaman.

Terakhir, perpustakaan juga berperan dalam mempromosikan literasi digital. Dengan menyediakan akses ke komputer dan internet, perpustakaan membantu individu untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan akses ke sumber daya online yang relevan. Secara keseluruhan, perpustakaan adalah sekutu yang tak ternilai dalam usaha meningkatkan literasi masyarakat. Dengan menyediakan akses, pendidikan, dan program-program yang mendukung pembelajaran seumur hidup, perpustakaan membantu membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, kritis, dan berbudaya. Mereka adalah tempat di mana pintu pengetahuan terbuka bagi semua orang, menginspirasi pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi perpustakaan tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) pada butir q yang menyebutkan bahwa “perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota”. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai wadah belajar masyarakat luas dalam mencapai budaya literasi masyarakat yang diukur dengan beberapa Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat sebagai berikut:

- a) Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)
- b) Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)
- c) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)
- d) Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)
- e) Perpustakaan ber-SNP (UPLM5)

f) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi (UPLM6)

g) Anggota Perpustakaan (UPLM7)

Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Blitar yang selanjutnya hasil dari pengukuran IPLM akan digunakan sebagai salah satu indikator kinerja kunci (IKK) dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayah Kota Blitar sebagai wahana belajar seumur hidup untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

2.7. Kondisi Ideal Perpustakaan

Makna perpustakaan sebenarnya bukan hanya tentang tempat, ruangan, atau gedung, melainkan tentang kontennya (koleksi), pengelolaan, dan layanan yang didasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi. Terutama dalam era disrupsi 4.0, perpustakaan harus mengadopsi revolusi dalam pelayanannya yang berfokus pada pemustaka (pengguna perpustakaan), agar tetap memenuhi peranannya sebagai penyimpan karya manusia, sumber informasi, tempat rekreasi, lembaga pendidikan, dan pusat budaya. Perpustakaan Daerah Kota Blitar telah berhasil menjalankan semua fungsi ini, bahkan berperan sebagai "deposit" untuk semua jenis karya intelektual (baik cetak, rekam, maupun digital) yang dihasilkan oleh pencipta dan produsen.

Namun, sayangnya, revolusi perpustakaan yang telah terjadi di Perpustakaan Daerah Kota Blitar belum secara merata diadopsi oleh semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Blitar. Meskipun Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan telah memberikan landasan hukum untuk memperbaiki kondisi perpustakaan, implementasinya belum sepenuhnya terwujud secara nyata. Kenyataan di lapangan masih dihadapkan pada banyak tantangan dan hambatan dalam upaya melaksanakan revolusi di berbagai jenis perpustakaan lainnya, termasuk perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.

Namun, bila melihat dari berbagai dimensi kualitas dan kuantitas termasuk pemanfaatan perpustakaan masih belum optimal. Beberapa kondisi faktual tentang pertumbuhan pembangunan perpustakaan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rasio ketersediaan koleksi yang ideal berdasarkan IFLA/UNESCO adalah 1:2. Artinya setiap 1 orang penduduk dapat mengakses minimal 2 judul buku setiap tahunnya.
- 2) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum masih rendah, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum dengan rasio 1 (satu) orang tenaga perpustakaan melayani 6087 penduduk Kota Blitar. Tenaga perpustakaan sebagai fasilitator dan advokator literasi belum dapat menjadi bagian terpenting sebagai subsistem sosial masyarakat dalam pendampingan masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan. Ketercukupan tenaga perpustakaan dinilai belum memenuhi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, karena dapat dikatakan cukup apabila 1 orang

tenaga perpustakaan melayani maksimal 2.500 penduduk sesuai dengan standar IFLA.

- 3) Tingkat pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan potensi perpustakaan yaitu jumlah kunjungan per hari dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat kecil sebesar 0,01%. Artinya, jumlah kunjungan per hari belum ideal dibandingkan dengan standar IFLA/UNESCO minimal 2% pemanfaatan perpustakaan.
- 4) Kualitas penyelenggaraan perpustakaan rendah, persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan baru 38%. Artinya, perpustakaan yang ada belum dapat menjadi ruang interaksi publik yang representatif dalam memfasilitasi masyarakat sebagai pusat berbagai pengamalan, ruang belajar kontekstual dan ruang peningkatan keterampilan untuk peningkatan kualitas hidup.

Kondisi ideal perpustakaan berdasarkan Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (*International Federation of Library Associations and Institutions*, disingkat IFLA) ditentukan oleh beberapa aspek yang mencakup urusan keuangan, pemenuhan kebutuhan pemustaka, pengembangan koleksi, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen perpustakaan.

Perpustakaan umum dan idealnya harus berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan harus mendapatkan pendanaan yang sesuai. Namun, terdapat situasi-situasi tertentu yang diakui, di mana perpustakaan mungkin tidak dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk semua kebutuhan, bahkan jika perpustakaan tersebut berada di tengah masyarakat yang sejahtera. Hal

ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, mengingat bahwa pengembangan layanan perpustakaan harus didasarkan pada landasan yang terencana dengan prioritas yang jelas. Proses ini diperlukan untuk menyelaraskan tingkat pendanaan yang tersedia untuk perpustakaan. Untuk menentukan rencana strategis dan menetapkan prioritas pemeliharaan, perpustakaan harus merumuskan kebijakan tertulis. Kebijakan tersebut perlu secara berkala diuji ulang dan disesuaikan jika diperlukan.

Manajemen perpustakaan harus memastikan bahwa jaringan telah dikembangkan dan dipertahankan ditingkat nasional, regional daerah, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai. Hal ini memungkinkan jangkauan yang luas bagi koleksi untuk bisa diakses oleh pemustaka. Manajer perpustakaan juga harus bisa mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan agen-agen lain di dalam komunikasi, contohnya, sekolah, kantor pemerintahan yang lain dan organisasi relawan demi keuntungan pemustaka. Serta mengkomiriasi peranan perpustakaan umum sebagai pusat aktiitas perpustakaan. Manajer perpustakaan harus, bilamana memungkinkan, memastikan bahwa perpustakaan berperan aktif dan positif dalam struktur korporasi dari lembaga induk.

Sehingga untuk pembangunan literasi masyarakat perlu dipersiapkan akses dan infra-struktur perpustakaan di tengah masyarakat. Kondisi ideal pembangunan literasi masyarakat setidaknya meliputi 4 (empat) aspek utama, yakni:

- 1) Peningkatan rasio ketersediaan koleksi buku perpustakaan dengan tingkat penduduk per kapita di Indonesia. Target pencapaian adalah

sesuai rasio ideal berdasarkan IFLA/UNESCO, yakni 1 koleksi : 2 penduduk;

- 2) Peningkatan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum dengan rasio 1 (satu) orang tenaga perpustakaan melayani masyarakat. Target pencapaian adalah 1 orang tenaga perpustakaan melayani maksimal 2.500 penduduk sesuai dengan standar IFLA;
- 3) Peningkatan pemanfaatan perpustakaan dan potensi perpustakaan, yakni dengan indikator jumlah kunjungan per hari dibandingkan dengan jumlah penduduk. Target jumlah kunjungan per hari sesuai standar IFLA/UNESCO adalah minimal 2% pemanfaatan perpustakaan;
- 4) Kualitas perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dengan standar nasional, perpustakaan dapat menjadi ruang interaksi publik yang representatif dalam memfasilitasi masyarakat sebagai pusat berbagai pengalaman, ruang belajar kontekstual, dan ruang peningkatan keterampilan untuk peningkatan kualitas hidup.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan Kota Blitar

Kota Blitar, yang juga dikenal sebagai Kota Patria, Kota Lahar, dan Kota Proklamator, secara resmi didirikan pada tanggal 1 April 1906. Peristiwa ini kemudian dijadikan Hari Jadi Kota Blitar. Meskipun memiliki status Pemerintah Kota, kota ini tidak langsung mengikuti pola kehidupan yang biasa terjadi di kota-kota besar. Selain itu, ukurannya juga tidak mencerminkan kota yang sangat luas. Sebenarnya, Kota Blitar berada di antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Faktualnya, kota ini bukan lagi kota kecil, tetapi juga belum mencapai status kota besar.

Penting untuk mengingat semangat perjuangan yang tumbuh di Kota Blitar dan terus mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara di sini. Di kota ini, Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, serta seorang pemikir besar yang dihormati baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, diberikan tempat peristirahatan terakhir. Kota Blitar juga memiliki makna sejarah yang signifikan bagi Bangsa Indonesia, di mana panggilan untuk kemerdekaan Indonesia pertama kali terdengar di sini, diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih dan akhirnya Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.

Masyarakat Kota Blitar dengan bangga menganggap diri mereka sebagai pewaris tradisi Aryo Blitar, Soeprijadi, dan Soekarno, dengan semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Pemerintah Kota Blitar

menyadari pentingnya memelihara semangat ini dan menggunakannya sebagai dasar untuk pembangunan masa depan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka memilih akronim PATRIA sebagai semboyan mereka. Kata PATRIA berasal dari kata PETA, yang merujuk pada legenda Soedanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada masa penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Lebih dari itu, kata PATRIA dipilih karena mencerminkan makna "Cinta tanah air", sehingga ketika menyebut kata PATRIA, akan teringat semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di Kota Blitar melalui perjuangan mereka masing-masing.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14 - 112^{\circ} 28$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2 - 8^{\circ} 10$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Provinsi Surabaya.

Kota Blitar terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Sananwetan. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

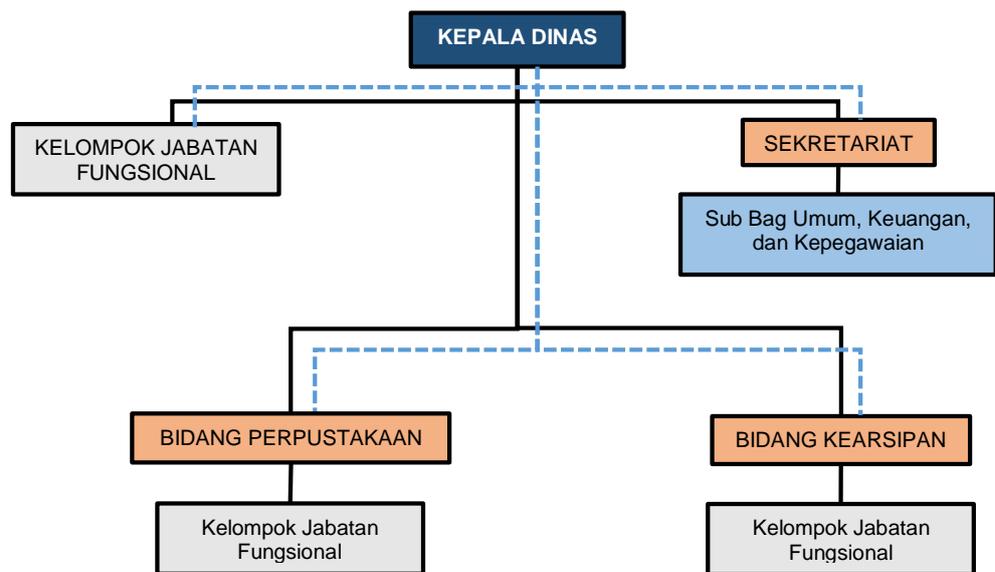
Peningkatan potensi sumber daya manusia di Kota Blitar memberi dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah. Pengembangan potensi SDM di daerah adalah investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan manfaat besar dalam hal pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik, dan peningkatan kesempatan bagi masyarakat setempat. Dengan berfokus pada peningkatan pendidikan, keterampilan, dan akses ke sumber daya, daerah dapat menciptakan komunitas yang lebih kuat dan berdaya saing.

Pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) di Kota Blitar adalah langkah kunci dalam memajukan Kota Blitar. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan daerah. Pengembangan potensi sumber daya manusia dapat didukung dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, pelatihan dan pengembangan keterampilan, pengaksesan pendidikan tinggi, promosi budaya literasi, pemberdayaan perempuan, pengembangan keterampilan tik, pendekatan berkelanjutan, dan lain sebagainya.

Budaya literasi mencakup sikap, nilai-nilai, praktik, dan perilaku yang mendorong minat dan partisipasi dalam aktivitas literasi, seperti membaca, menulis, dan berbagi pengetahuan. Upaya promosi budaya literasi dilakukan melalui berbagai acara dan program yang dirangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan

daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Gambar 3. 1
Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar



Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. Gambaran Aspek Masyarakat

Aspek Masyarakat dalam pengukuran IPLM terdiri atas jumlah penduduk Kota Blitar, Populasi siswa, polupasi guru, populasi civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa dan dosen, serta populasi penduduk bekerja.

Tabel 3. 2 Gambaran Aspek Masyarakat

POPULASI PROVINSI/ KAB/KOTA (Jiwa)		151.960
LUAS WILAYAH PER PROVINSI (Km²)		32,57
TINGKAT KEPADATAN (Jiwa/Km²)		466564,3
ANGKA KOREKSI		1,5
POPULASI SISWA	SD	12502
	MI	3895
	SMP	8455
	MTs	3006
	SMA/K	15945
	MA	1755
POPULASI GURU	SD	732
	MI	222
	SMP	509
	MTs	185
	SMA/K	911
	MA	177
POPULASI MAHASISWA		3077
POPULASI DOSEN		267
POPULASI BEKERJA		73616

Jumlah Aspek Masyarakat di atas merupakan data yang dirangkum dari berbagai sumber seperti Laporan periodik Badan Pusat Statistik (BPS), Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, dan Data EMIS-Pendidikan Islam.

3.3. Gambaran Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 (tujuh) unsur diantaranya pemerataan pelayanan perpustakaan, ketersediaan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, keterlibata masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dan pemustaka yang terdaftar.

3.3.1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan se-Kota Blitar adalah sebanyak 144 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi.

Tabel 3. 3 Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)

Jenis perpustakaan	Jumlah
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	1
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	3
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	1
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-
b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	72
b. SMP/MTS	25
c. SMA/SMK/MA	21
d. Pondok Pesantren	-

4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	7
Jumlah Perpustakaan	129

Pada tahun 2023, Kota Blitar memiliki 1 (satu) perpustakaan umum ditingkat kecamatan, tetapi masih belum memiliki perpustakaan umum ditingkat kelurahan dan taman baca. Begitu pula dengan perpustakaan khusus baik perpustakaan khusus yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Perpustakaan umum yang ada di Kota Blitar hanya Perpustakaan Umum Daerah Kota Blitar. Namun demikian pemerataan layanan perpustakaan sekolah sudah baik dimana setiap sekolah di Kota Blitar memiliki perpustakaan masing-masing. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebanyak 129 perpustakaan dan jumlah penduduk Kota Blitar sebanyak 151.960, artinya pada tahun ini, setiap satu perpustakaan di Kota Blitar melayani 1.178 orang penduduk. Adapun capaian skor UPLM₁ adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Skor UPLM₁

Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,000007
		KEC	0,000000
		DESA/KEL	0,000020
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,004150
		SMP/Mts	0,002057
		SMA/K/MA	0,001118
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,002093	
Perpustakaan Khusus	0,000000		
SKOR UPLM₁ KOTA BLITAR			0,002845

Capaian skor UPLM₁ Kota Blitar tahun 2023 adalah 0,002845. Artinya rasio pemerataan pelayanan perpustakaan di Kota Blitar adalah 0,002845 per orang.

3.3.2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)

Selain jumlah perpustakaan, diketahui jumlah koleksi buku pada perpustakaan di Kota Blitar berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2023 adalah sebanyak 29.534 judul buku. Selanjutnya jika diamati berdasarkan jenis perpustakaan, jumlah koleksi tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Ketercukupan Koleksi (UPLM2)

Jenis perpustakaan	Jumlah (judul)
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	900
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	2403
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-
b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	7379
b. SMP/MTS	6756
c. SMA/SMK/MA	5647
d. Pondok Pesantren	-
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	6449
Jumlah Koleksi Perpustakaan	29.534

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan terhadap populasi penduduk Kota Blitar

adalah 1:5, artinya setiap 1 judul buku diakses oleh 5 orang penduduk di Kota Blitar. Jumlah ini terpaut jauh dari standar ketercukupan koleksi berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh IFLA/UNESCO yaitu 2:1 atau minimal terdapat 2 judul buku untuk setiap penduduk. Dengan demikian, ketersediaan koleksi di Kota Blitar hanya mencapai 9,7% dari jumlah ketersediaan koleksi yang ideal atau butuh tambahan 274.386 buku untuk mencapai jumlah ideal koleksi perpustakaan. Adapun capaian skor UPLM₂ adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 skor UPLM₂

Rasio Ketersediaan Koleksi Perpustakaan (Judul Per Orang)	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,005922
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,015813
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,482911
		SMP/MTs	0,310489
		SMA/K/MA	0,244517
	Perpustakaan Perguruan Tinggi		1,928528
	Perpustakaan Khusus		0
SKOR UPLM₂ KOTA BLITAR			0,979359

Capaian skor UPLM₂ Kota Blitar tahun 2023 adalah 0,979359. Artinya rasio ketersediaan koleksi perpustakaan di Kota Blitar adalah 0,979359 judul buku per orang.

3.3.3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM₃)

Jumlah tenaga perpustakaan secara keseluruhan di Kota Blitar berdasarkan temuan survei IPLM 2023 adalah sebanyak 221 orang. Jumlah tenaga perpustakaan berdasarkan jenis perpustakaan yang ada di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)

Jenis perpustakaan	Jumlah (orang)
5. Perpustakaan Umum	
e. Perpustakaan Umum Kota	14
f. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
g. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	3
h. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
6. Perpustakaan Khusus	
c. Pemerintah	-
d. Swasta	-
7. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
e. SD/MI	72
f. SMP/MTS	58
g. SMA/SMK/MA	40
h. Pondok Pesantren	-
8. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	20
Jumlah Tenaga Perpustakaan	207

Jika diamati berdasarkan jenis perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan berdasarkan jenis perpustakaan tersebut diketahui bahwa perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi memiliki nilai dibawah nilai standar yang ditentukan IFLA/UNESCO sehingga kedua perpustakaan ini dikatakan memenuhi standar ketercukupan tenaga perpustakaan. Sedangkan perpustakaan umum Kota Blitar, memiliki angka yang jauh diatas standar sehingga, berdasarkan standar IFLA/UNESCO, belum memenuhi standar ketercukupan tenaga perpustakaan. Selain itu, belum ada jenis perpustakaan Khusus di Kota Blitar sehingga tidak dapat diketahui

ketercukupan tenaga perpustakaan. Adapun rasio ketercukupan tenaga perpustakaan berdasarkan jenis perpustakaan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 skor UPLM3

Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Orang)	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,000092
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,000020
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,004150
		SMP/MTs	0,004772
		SMA/K/MA	0,002129
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,005981	
	Perpustakaan Khusus	0,000000	
SKOR UPLM3 KOTA BLITAR			0,005193

Capaian skor UPLM3 Kota Blitar adalah 0,005193. Artinya rasio ketercukupan tenaga perpustakaan di Kota Blitar adalah 0,005193.

3.3.4. Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)

Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara keseluruhan di Kota Blitar berdasarkan temuan survei IPLM 2023 adalah sebanyak 3058 orang per hari. Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan berdasarkan jenis perpustakaan yang ada di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)

Jenis perpustakaan	Jumlah (orang/hari)
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	198
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	0

c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	80
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-
b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	1264
b. SMP/MTS	1008
c. SMA/SMK/MA	619
d. Pondok Pesantren	-
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	65
Jumlah Tenaga Perpustakaan	2176

Rata-rata kunjungan masyarakat ke perpustakaan Kota Blitar adalah sebanyak 2176 kunjungan/hari. Adapun rasio kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Kota Blitar ada 1:70, artinya terdapat 1 dari 70 orang penduduk yang mengunjungi Perpustakaan umum setiap harinya. Berdasarkan data jumlah kunjungan per hari kemudian dapat diketahui tingkat pemanfaatan perpustakaan, yakni jumlah kunjungan per hari dibagi dengan jumlah penduduk x 100. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dikatakan ideal jika nilai rasionya lebih besar atau sama dengan 2%. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kota Blitar pada tahun 2023 mencapai 1,4% (kurang dari 2%) artinya tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kota Blitar belum ideal karena belum mencapai batas minimum standar minimal pemanfaatan perpustakaan yang ideal.

Adapun rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Skor UPLM4

Rasio Kunjungan Masyarakat per Hari (Orang/hari)	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,001303
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,000526
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,011873
		SMP/MTs	0,082929
		SMA/K/MA	0,032947
	Perpustakaan Perguruan Tinggi		0,019438
	Perpustakaan Khusus		0,000000
SKOR UPLM4 KOTA BLITAR			0,045528

Capaian skor UPLM4 Kota Blitar adalah 0,045528. Artinya rasio kunjungan masyarakat di Kota Blitar per hari adalah 0,045528.

3.3.5. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)

Sertifikasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) bertujuan agar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Temuan survei tahun 2023 menunjukkan bahwa perpustakaan yang dipersepsikan ber-SNP di Kota Blitar adalah sebanyak 44 perpustakaan. Adapun jumlah perpustakaan yang dipersepsikan ber-SNP di Kota Blitar berdasarkan jenis perpustakaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)

Jenis perpustakaan	Jumlah
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	1
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	-
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-
b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	48
b. SMP/MTS	13
c. SMA/SMK/MA	2
d. Pondok Pesantren	-
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	0
Jumlah Perpustakaan ber-SNP	64

Diketahui bahwa jumlah perpustakaan yang dipresepsikan berSNP pada jenis Perpustakaan Umum Kota Blitar 1 perpustakaan, Perpustakaan Sekolah SD/MI 48 perpustakaan, Perpustakaan Sekolah SMP/MTs 13 perpustakaan, dan Perpustakaan Sekolah SMA/K/MA 2 perpustakaan, sehingga jumlah perpustakaan yang dipresepsikan ber-SNP di Kota Blitar adalah 64 perpustakaan.

Adapun rasio perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Skor UPLM5

Rasio Perpustakaan ber-SNP	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	1,000000
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,000000
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,666667
		SMP/MTs	0,520000
		SMA/K/MA	0,095238
	Perpustakaan Perguruan Tinggi		0,000000
	Perpustakaan Khusus		0,000000
SKOR UPLM5 KOTA BLITAR			1,134571

Capaian skor UPLM5 Kota Blitar adalah 1,134571. Artinya rasio perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Kota Blitar adalah 1,134571.

3.3.6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)

Temuan survei IPLM Kota Blitar 2023 menunjukkan bahwa jumlah kegiatan perpustakaan di Kota Blitar yang melibatkan masyarakat yaitu 86 kegiatan dengan jumlah peserta (masyarakat) yang terlibat sejumlah 3523 orang. Adapun jumlah keterlibatan masyarakat pada kegiatan perpustakaan kberdasarkan jenis perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)

Jenis perpustakaan	Jumlah
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	1844
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	-
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-

b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	959
b. SMP/MTS	670
c. SMA/SMK/MA	0
d. Pondok Pesantren	-
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	50
Jumlah Tenaga Perpustakaan	3523

Jumlah keterlibatan masyarakat pada kegiatan di Perpustakaan Umum Kota Blitar adalah sebanyak 1844 orang. Jumlah keterlibatan masyarakat pada kegiatan di Perpustakaan Sekolah SD/MI adalah sebanyak 959 orang. Jumlah keterlibatan masyarakat pada kegiatan di Perpustakaan Sekolah SMP/MTs adalah sebanyak 670 orang. Jumlah keterlibatan masyarakat pada kegiatan di Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebanyak 50 orang.

Adapun rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Skor UPLM6

Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan KIE Perpustakaan	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,012135
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,000000
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,055271
		SMP/MTs	0,055121
		SMA/K/MA	0,000000
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,014952	
	Perpustakaan Khusus	0,000000	
SKOR UPLM6 KOTA BLITAR			0,046704

Capaian skor UPLM6 Kota Blitar adalah 0,046704. Artinya rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE yang diadakan oleh perpustakaan di Kota Blitar adalah 0,046704.

3.3.7. Anggota Perpustakaan (UPLM7)

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan di Kota Blitar adalah sebanyak 29.873 orang. Adapun jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar berdasarkan jenis perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Anggota Perpustakaan (UPLM7)

Jenis perpustakaan	Jumlah
1. Perpustakaan Umum	
a. Perpustakaan Umum Kota	2418
b. Perpustakaan Umum Kecamatan	-
c. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	15
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar	-
2. Perpustakaan Khusus	
a. Pemerintah	-
b. Swasta	-
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah	
a. SD/MI	9055
b. SMP/MTS	7778
c. SMA/SMK/MA	8392
d. Pondok Pesantren	-
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2215
Jumlah Tenaga Perpustakaan	29873

Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Umum Kota Blitar adalah sebanyak 2418 orang. Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Umum Kelurahan adalah sebanyak 15 orang. Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Sekolah SD/MI adalah sebanyak 9055 orang. Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Sekolah SMP/MTs adalah sebanyak 7778 orang. Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebanyak 8392 orang. Jumlah anggota yang terdaftar di Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebanyak 2215 orang.

Adapun rasio rasio pemustaka yang terdaftar di perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Skor UPLM7

Rasio Pemustaka yang Terdaftar	Perpustakaan Umum	Kab/Kota	0,015912
		Kec	0,000000
		Desa/Kel	0,000099
	Perpustakaan Sekolah	SD/MI	0,521872
		SMP/MTs	0,639901
		SMA/K/MA	0,446668
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,662380	
	Perpustakaan Khusus	0,000000	
SKOR UPLM7 KOTA BLITAR			0,693255

Capaian skor UPLM7 Kota Blitar adalah 0,693255. Artinya rasio pemustaka yang terdaftar di perpustakaan di Kota Blitar adalah 0,693255.

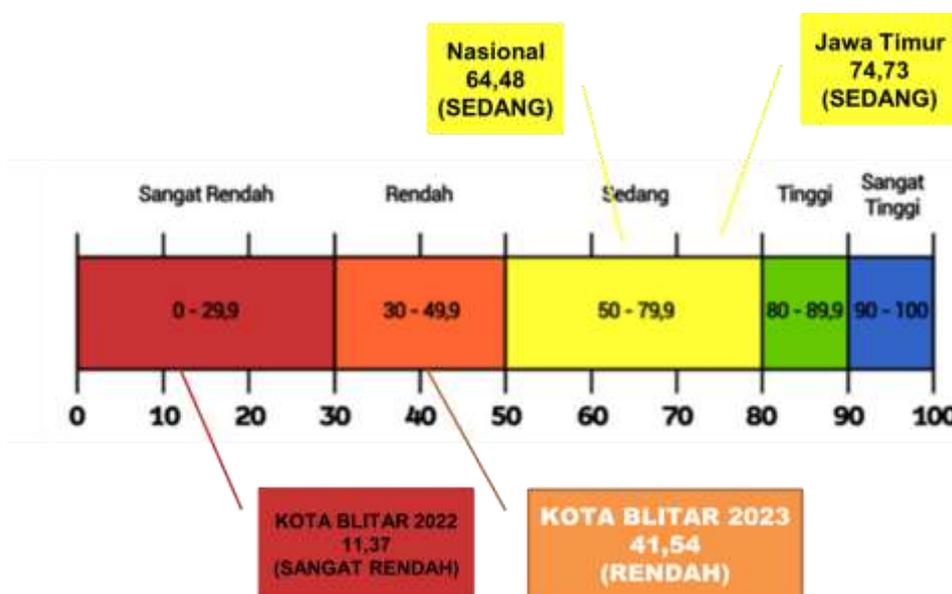
3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar

Berdasarkan capaian setiap Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat tersebut diperoleh skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023

Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,002846
Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	: 0,979359
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,005193
Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	: 0,045528
Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 1,134571
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	: 0,046704
Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 0,693255
IPLM Kota Blitar Tahun 2023	: 41,54

Capaian skor IPLM Kota Blitar tahun 2023 adalah **41,54 pada skala 0-100** dimana capaian ini termasuk dalam kategori rendah. Jika dibandingkan dengan capaian skor IPLM tahun 2022, capaian ini lebih tinggi. Meskipun lebih rendah dari capaian skor IPLM pada tingkat Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Skor IPLM

Dibandingkan capaian tahun 2022, skor IPLM meningkat dari kategori sangat rendah menjadi rendah pada tahun 2023. Meskipun capaian ini masih terpaut cukup jauh dari Skor IPLM Jawa Timur dan Nasional yang

berada pada kategori sedang. Mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, angka tersebut kemudian diterjemahkan dengan menggunakan skala skor 0-20 sehingga diperoleh capaian skor **IPLM Kota Blitar yaitu 8,8**.

3.5. Perbandingan hasil skor IPLM tahun 2022 dan tahun 2023

Perbandingan hasil skor IPLM Kota Blitar dari tahun 2022 ke tahun 2023 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Perbandingan hasil skor IPLM tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator/tahun	2022	2023	Ket
Skor IPLM	11,37	41,45	Naik↑
Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,002846	0,002846	Tetap
Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,059917	0,979359	Naik↑
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,001978	0,005193	Naik↑
Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,031306	0,045528	Naik↑
Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,168404	1,134571	Naik↑
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,000501	0,046704	Naik↑
Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,351408	0,693255	Naik↑

Pada tabel di atas diketahui bahwa capaian skor IPLM Kota Blitar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor pada hampir seluruh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yang naik dari tahun sebelumnya. Adapun UPLM yang mengalami kenaikan perolehan skor diantaranya Ketercukupan Koleksi (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4), Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5),

Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6), dan Anggota Perpustakaan (UPLM7). Sedangkan Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau sama dengan perolehan tahun lalu. Dari 6 (enam) UPLM yang meningkat, terdapat 2 (dua) unsur yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu Ketercukupan Koleksi (UPLM2) dan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6). Unsur Ketercukupan Koleksi (UPLM2) meningkat drastis dibanding perolehan tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,919442 dan unsur Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6) mengalami peningkatan sebesar 0,046203.

Secara umum peningkatan jumlah koleksi perpustakaan seringkali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Pengelolaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pembaca adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan koleksi perpustakaan. Adanya peningkatan jumlah koleksi perpustakaan menunjukkan bahwa terdapat perkembangan perpustakaan dalam upaya pengadaan bahan bacaan di perpustakaan. Selain itu, beberapa perpustakaan menyatakan bahwa mereka mendapatkan bantuan buku dari Perpustakaan luar sehingga memperkaya koleksi yang dimiliki. Program pertukaran koleksi dengan perpustakaan lain, baik di tingkat regional atau nasional, dapat meningkatkan variasi koleksi. Pertukaran ini memungkinkan perpustakaan mendapatkan akses ke buku-buku yang mungkin tidak tersedia di daerah mereka sendiri.

Pada tahun-tahun pandemi COVID-19, banyak perpustakaan yang mengalami penutupan sementara atau pembatasan akses untuk

mencegah penyebaran virus. Hal ini disebabkan oleh langkah-langkah pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seiring berakhirnya pandemi atau mengendurnya pembatasan yang diterapkan mempengaruhi peningkatan keterlibatan masyarakat pada kegiatan perpustakaan. Saat pandemi berakhir, masyarakat dapat merasa lebih nyaman untuk kembali ke kehidupan sehari-hari, termasuk mengunjungi tempat umum seperti perpustakaan. Kembalinya keadaan normal dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perpustakaan secara langsung. Perpustakaan sering menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk melibatkan masyarakat, seperti klub buku, lokakarya, dan pertemuan komunitas. Dengan berakhirnya pandemi, perpustakaan dapat merintis kembali program-program ini, menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Penting untuk dicatat bahwa selain dampak berakhirnya pandemi dimungkinkan terdapat faktor-faktor lokal, budaya, dan kebijakan yang diterapkan di berbagai perpustakaan di Kota Blitar dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kegiatan perpustakaan di Kota Blitar.

3.6. Laporan Skor IPLM Kota Blitar tahun 2023

KOTA BLITAR		 Jumlah penduduk (2023): 151.960 Penduduk usia sekolah 2023 (5-19 tahun): 34.151 Penduduk usia perguruan tinggi 2023 (20-24 tahun): 11.185
IPLM 2023	: 41,54	
Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,002846	
Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	: 0,979359	
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,005193	
Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	: 0,045528	
Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 1,134571	
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	: 0,046704	
Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 0,693255	

Indikator Indeks Pembangunan	Nilai	Intrepretasi
1. Rasio ketersediaan perpustakaan		
a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,000007	Terdapat 7 perpustakaan per 100.000 penduduk
b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,00346	Terdapat 34 perpustakaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah
c. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi	0,00062	Terdapat 6 perpustakaan perguruan tinggi per 10.000 penduduk usia perguruan tinggi
2. Presentase perpustakaan ber-SNP	49,6%	Terdapat 49,6% perpustakaan yang dipresepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	0,19435	Terdapat 19 koleksi dapat diakses oleh 100 orang. Belum memenuhi
4. Kekurangan jumlah koleksi	274.386	Kekurangan jumlah koleksi di Kota Blitar sebanyak 274.386
5. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	734	Setiap 1 tenaga perpustakaan melayani 734 penduduk: Mencukupi
6. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	1,91%	Presentase jumlah kunjungan per hari dibagi penduduk sebanyak 1,91%= belum ideal
7. Tingkat keaktifan pemanfaatan perpustakaan	1,2%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebesar 1,2%
8. Tingkat engagement anggota perpustakaan	19,6%	Terdapat 19,6% penduduk Kota Blitar yang merupakan anggota perpustakaan

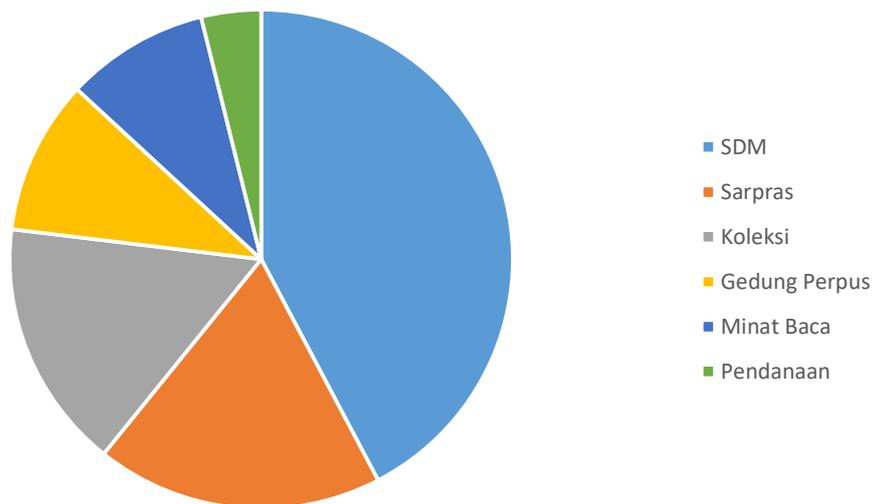
3.7. Kendala Pengelolaan Perpustakaan

Dalam upaya pengelolaan perpustakaan, pengelola perpustakaan di Kota Blitar tentunya mengalami kendala. Pengelolaan perpustakaan di Kota Blitar menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah infrastruktur yang terkadang tidak memadai, seperti ruang penyimpanan yang terbatas dan fasilitas yang kurang mendukung. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengembangkan koleksi buku yang relevan dan *up-to-date*, mengingat dinamika perkembangan pengetahuan dan kebutuhan bacaan masyarakat. Dalam mengatasi kendala ini, perlu adanya strategi pengelolaan yang inovatif dan kolaboratif antara pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Selain itu, perpustakaan di Kota Blitar juga dihadapkan pada tantangan dalam mengadaptasi teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan perpustakaan. Penggunaan sistem manajemen perpustakaan yang efektif dan integrasi teknologi informasi menjadi kunci penting untuk mengoptimalkan operasional perpustakaan. Dalam pembahasan ini, perlu ditekankan pula pentingnya literasi digital bagi staf perpustakaan dan masyarakat guna memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak positif secara maksimal. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala ini, pengelolaan perpustakaan di Kota Blitar dapat ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mempromosikan budaya literasi di tingkat lokal.

Lebih jauh, kendala-kendala yang dialami oleh masing-masing perpustakaan dirangkum sehingga dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana pada grafik sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Gambaran Kendala Pengelolaan Perpustakaan



Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh para pengelola perpustakaan di Kota Blitar berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar perpustakaan sekolah di Kota Blitar, terlebih perpustakaan sekolah dasar (SD/Sederajat) mengungkapkan bahwa perpustakaan tidak memiliki pustakawan sehingga tanggungjawab mengelola perpustakaan dilimpahkan kepada guru/pegawai tata usaha. Dengan demikian, pengelolaan perpustakaan tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini diperparah dengan rendahnya pengetahuan pustakawan atau pengelola perpustakaan mengenai prosedur atau sistem yang baik dan efektif untuk mengelola perpustakaan. Sehingga dibutuhkan pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi petugas perpustakaan.

3.8. Rekomendasi Program/Kegiatan

Setelah diperoleh hasil skor IPLM Kota Blitar tahun 2023 maka perlu dibuatkan usulan program atau kegiatan, sehingga akan memberikan nilai tambah dan arah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan literasi di masa yang akan datang. Berikut ini akan disajikan usulan program atau kegiatan.

1. Memberikan pelatihan bagi petugas perpustakaan berupa tata cara dan sistem perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebagai wujud upaya mendorong efektifitas perpustakaan dan mendorong perpustakaan ber-SNP di Kota Blitar.
2. Renovasi dan Perluasan Ruang Perpustakaan di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Mengalokasikan anggaran untuk merenovasi dan memperluas ruang perpustakaan, termasuk peningkatan fasilitas seperti ruang baca, ruang anak-anak, area komputer, dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Pengadaan Koleksi Baru di setiap perpustakaan secara rutin. Memperbarui koleksi buku dengan penambahan buku-buku terbaru, termasuk buku-buku digital, dan materi referensi yang relevan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan.
4. Peningkatan Keamanan dan Kebersihan di lingkungan perpustakaan. Memperhatikan faktor keamanan dan kebersihan dengan sistem keamanan yang baik dan merawat kebersihan lingkungan perpustakaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pengunjung.

5. Konservasi dan Pemeliharaan Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan.
Mengalokasikan dana untuk pemeliharaan koleksi buku dan materi berharga lainnya dalam kondisi yang baik melalui perawatan, restorasi, dan perlindungan yang tepat.
6. Mengadakan program penghargaan atau program insentif bagi pengunjung setia perpustakaan, seperti program pengumpulan stempel setiap kali kunjungan atau program penarikan hadiah. Juga memberikan penghargaan bagi perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kota Blitar yang memiliki inovasi di perpustakaan.
7. Memperjelas regulasi daerah yang berkaitan dengan Perpustakaan Umum Kota Blitar. Regulasi daerah yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan karena regulasi tersebut mengatur secara spesifik tentang perpustakaan terutama dalam memberikan layanan kepada pemustaka.

Dengan mengimplementasikan beberapa program/kegiatan tersebut, diharapkan perpustakaan dapat menjadi lebih menarik dan relevan bagi masyarakat, dan dapat mengundang lebih banyak kunjungan ke perpustakaan. Serta dapat membantu membangun dan meningkatkan sarana prasarana perpustakaan di Kota Blitar, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pendidikan, literasi, dan pengembangan masyarakat. Namun demikian, agar program tersebut dapat dijalankan dengan baik perlu adanya dukungangn dari masyarakat yang berupa saran dan pendapatnya terkait dengan perlunya dukungan fasilitas sarana dan prasarana baca yang memadai dan menyeluruh di wilayah Kota Blitar serta kebijakan dari Pemerintah Kota Blitar melalui OPD terkait yang mendukung realisasi pembangunan literasi di Kota Blitar agar bisa terus tumbuh dan

berkembang seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil survei dan analisis data yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar berada pada kategori yang rendah, dengan besaran skor sebesar 41,54. Ini merupakan indikasi yang mengkhawatirkan, karena literasi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berbudaya dan berpengetahuan. Skor yang rendah dalam IPLM ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat di Kota Blitar. Literasi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Oleh karena itu, peningkatan literasi di masyarakat adalah sebuah keharusan.

Dalam upaya meningkatkan IPLM, kami memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan pertimbangan akademis dan data empiris yang kami kumpulkan selama proses evaluasi ini. Rekomendasi-rekomendasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu. Salah satu rekomendasi utama adalah perluasan dan perbaikan akses ke perpustakaan, sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses sumber-sumber literasi. Selain itu, perlu adanya program-program literasi yang beragam seperti pemberian penghargaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan

Kami sangat berharap bahwa hasil evaluasi ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, serta para pemangku kebijakan lainnya, dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi di masyarakat Kota Blitar. Literasi adalah salah satu fondasi utama untuk kemajuan intelektual dan sosial suatu masyarakat, dan melalui kerja keras dan kerjasama yang baik, diharapkan Kota Blitar dapat mencapai skor IPLM yang lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah dalam hal literasi dan pengetahuan.

Demikianlah laporan ini kami susun, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan evaluasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan minat membaca dan literasi. Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dan literat, sebagai bagian dari peran penting pembangunan Kota Blitar ke depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Pengumpulan Data

LEMBAR KUISONER

SURVEY INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI

MASYARAKAT KOTA BLITAR

TAHUN 2023

IDENTITAS INSTANSI

Nama dinas :
Alamat Instansi :
Desa/Kelurahan _____
Kecamatan _____
Kota Blitar
No. telepon Instansi :
Email :
Situs Instansi :
Tanggal survey :

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
No. telepon :

A. DATA PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR

- P1 Berapa jumlah perpustakaan berikut di tahun 2023?
- P2 Berapa jumlah Perpustakaan yang dipresepsikan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) di tahun 2023?
- P3 Apakah bukti akreditasi perpustakaan ber-SNP tersedia? (jika YA, lengkapi dengan data pendukung)

Jenis Perpustakaan	Jumlah (P1)	Jumlah ber-SNP (P2)	Bukti akreditasi (P3)	
			Ya	Tidak
5. Perpustakaan Umum				
e. Perpustakaan Umum Kota
f. Perpustakaan Umum Kecamatan
g. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan
h. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar
6. Perpustakaan Khusus				
c. Pemerintah
d. Swasta
7. Perpustakaan Sekolah/Madrasah				
e. SD/MI
f. SMP/MTS
g. SMA/SMK/MA
h. Pondok Pesantren
8. Perpustakaan Pendidikan Tinggi

B. DATA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR

- P4 Berapa jumlah peprustakaan berikut yang memiliki akses internet bagi pemustaka?
- P5 Apakah perpustakaan berikut memiliki koleksi digital?
 - a. Ya tersedia
 - b. Tidak tersedia

Jenis Perpustakaan	Jumlah ber-TIK (P4)	Koleksi digital (P5)
--------------------	---------------------	----------------------

		Ya	Tidak
1. Perpustakaan Umum			
a. Perpustakaan Umum Kota
b. Perpustakaan Umum Kecamatan
c. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan
d. Perpustakaan komunitas, taman baca, rumah pintar
2. Perpustakaan Khusus			
a. Pemerintah
b. Swasta
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah			
a. SD/MI
b. SMP/MTS
c. SMA/SMK/MA
d. Pondok Pesantren
4. Perpustakaan Pendidikan Tinggi

C. DATA JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN

P6 Berapa jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan berikut per tahun 2023?

P7 Berapa jumlah koleksi perpustakaan berikut yang dipinjam per tahun 2023?

No	Kategori koleksi	Koleksi yang dimiliki (P6)				Koleksi yang dipinjam (P7)			
		Umum	Khusus	Sekolah	PT	Umum	Khusus	Sekolah	PT
1	Komputer, Informasi, dan Karya umum								
2	Filsafat dan Psikologi								
3	Agama								
4	Ilmu Pengetahuan Sosial								
5	Bahasa								
6	Sains								
7	Teknologi								
8	Kesenian								
9	Sastra								
10	Geografi dan Sejarah								
TOTAL									

D. DATA KETERSEDIAAN JENIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN

P8 Apakah jenis koleksi berikut tersedia di perpustakaan per tahun 2023?

No	Jenis Koleksi (P8)	Perpus umum		Perpus Khusus		Perpus Sekolah		Perpus PT	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Buku								
2	Majalah								
3	Koran								
4	Rekaman suara (kaset, CD, file audio)								
5	Gambar hidup & rekaman audio-visual (film, video)								
6	Bahan grafika (foto, lukisan, peta, bola dunia, dll)								
7	e-Book & koleksi digital lainnya								

E. DATA SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN

P9 Bagaimana komposisi jumlah Tenaga perpustakaan berikut per tahun 2023?

P10 Bagaimana komposisi jumlah SDM perpustakaan berikut per tahun 2023?

No	Komposisi tenaga Perpustakaan (P9)	Jumlah SDM Perpustakaan (orang)			
		umum	Khusus	Sekolah	PT
1	Pustakawan yang memiliki SK Fungsional				
2	Pustakawan yang memiliki kualifikasi/latar belakang bidang ilmu perpustakaan				
3	Tenaga teknis (Teknis komputer, Ketatausahaan, Audio Visual) yang memiliki sertifikasi Diklat dari Perpunas RI/keperpustakaan				
4	Tenaga teknis atau Tenaga Pendukung yang tidak memiliki latar belakang bidang ilmu perpustakaan sertifikasi Diklat dari Perpunas RI/keperpustakaan				
TOTAL					

No	Komposisi SDM (P10)	Jumlah SDM Perpustakaan (orang)			
		umum	Khusus	Sekolah	PT
1	Pendidikan Pascasarjana (S2 & S3)				
2	Pendidikan Sarjana (S1)				
3	Pendidikan Diploma (D1-D3)				
4	Pendidikan SMA/Sederajat				
TOTAL					

F. DATA JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN

P11 Berapa jumlah pemustaka di perpustakaan berikut dan jumlah rata-rata kunjungan per hari per tahun 2023?

No	Komposisi SDM	Jumlah SDM Perpustakaan (orang)			
		umum	Khusus	Sekolah	PT
1	Jumlah anggota perpustakaan terdaftar				
2	Jumlah pemustaka (orang yang datang dan memanfaatkan fasilitas di perpustakaan)				
3	Jumlah kunjungan rata-rata per-hari				

P12 Apakah perpustakaan memiliki profil demografi data pemustaka?

- a. Ya (lengkapi tabel)
- b. Tidak (langsung ke P13)

No	Kategori usia	Jumlah	%	Pekerjaan	Jumlah	%
1	<18 tahun			Pelajar/Mahasiswa		
2	19-25 tahun			ASN/TNI/Polri		
3	26-35 tahun			Karyawan Swasta		
4	36-45 tahun			Pedagang/Wirausaha		
5	46-55 tahun			Ibu Rumah Tangga		
6	>55 tahun			Tidak bekerja		
				Lainnya		

G. KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN

P13 Apakah perpustakaan Daerah mengadakan kegiatan sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan kegiatan pemanfaatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat per tahun 2023 (termasuk workshop, pelatihan, bimbingan teknis, bedah buku, kegiatan bersama komunitas dll)?

a. Ya (isi P14 dan P15)

b. Tidak (langsung P16)

P14 Berapa jumlah kegiatan sosialisasi KIE dan kegiatan pemanfaatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat selama tahun 2023?

_____ kegiatan

P15 Berapa estimasi jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat selama tahun 2023?

_____ orang

P16 Apakah Perpustakaan Kota Blitar memiliki akun sosial media?

a. Ya (isi P17)

b. Tidak

P17 Apakah akun sosial media Perpustakaan Kota Blitar dalam 3 bulan terakhir aktif mengunggah informasi publik?

No	Sosial media	Kepemilikan (P16)		Aktif 3 bulan terakhir (P17)	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Youtube				
2	Facebook				
3	Instagram				
4	Twitter				
5	Line				
6	Telegram				
7	Whatsapp				

P18 Kendala yang dimiliki Perpustakaan

.....

Lampiran 2 Dokumentasi Pemaparan Laporan Pendahuluan



Lampiran 3 Dokumentasi Pengumpulan Data



Lampiran 4 Dokumentasi Pemaparan Laporan Akhir IPLM



